

## **Analisis Kebutuhan Prasarana Dasar Pada Kawasan Permukiman Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur**

*Analysis of Basic Infrastructure Needs for The Pongkeru Village Settlement Area, Malili  
District, East Luwu Regency*

**Andi Fathussalam Baharuddin**

E-mail : fathussalam09@gmail.com

Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Andi Djemma

Diterima: 10 September 2023 / Disetujui: 30 Desember 2023

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan prasarana dasar kawasan permukiman Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini digolongkan kedalam penelitian kuantitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis pembobotan, metode ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan prasarana dasar dilokasi penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) jenis jalan lingkungan di Desa Pongkeru adalah aspal dengan panjang 6.722 meter, jalan beton panjang 6.628 meter, (2) jaringan drainase di Desa Pongkeru adalah drainase sekunder kondisi permanen dengan lebar 70-90 cm, (3) kondisi air bersih di Desa Pongkeru terdapat 96 KK yang sudah terjangkau air yang bersumber dari PDAM dan sisanya memakai air tanah dangkal dan dalam, dan (4) kondisi prasarana persampahan di Desa Pongkeru masih di kelola secara konvensional setiap rumah dengan cara dibakar dan ditanam.

**Kata Kunci:** Kebutuhan, Prasarana Dasar, Kawasan Permukiman

### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to determine the basic infrastructure needs of the residential area of Pongkeru Village, Malili District, East Luwu Regency. This type of research is classified as quantitative research. The data analysis used is weighting analysis, this method is carried out to determine basic infrastructure needs at the research location. The results of the analysis show that (1) the type of environmental road in Pongkeru Village is asphalt with a length of 6,722 meters, a concrete road with a length of 6,628 meters, (2) the drainage network in Pongkeru Village is permanent secondary drainage with a width of 70-90 cm, (3) the condition clean water in Pongkeru Village, there are 96 families who have access to water sourced from PDAM and the rest use shallow and deep groundwater, and (4) the condition of waste infrastructure in Pongkeru Village is still managed conventionally, every house is burned and planted.*

**Keywords :** *Development, Basic Infrastructure, Residential Areas*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

### **A. PENDAHULUAN**

Pembangunan kawasan permukiman kaitannya dengan penyediaan prasarana dasar akan selalu berjalan sejajar dengan dinamika perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi akan berdampak pada tingginya kebutuhan akan penyediaan prasarana dasar (Syaban et al, 2014; Hidayati et al, 2020). Dengan demikian diidentifikasi masalah prasarana pada suatu kawasan

permukiman, tiap hari semakin kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain; perpindahan penduduk dari perdesaan ke daerah perkotaan dan pengaruh ekonomi global (Mari, 2022). Faktor penyebab eksternal yang paling menonjol adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk yang didominasi oleh perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan (migrasi desa kota) akibat faktor daya tarik perkotaan (Indrjaya et al, 2022; Sudibiya et al, 2012).

Penyediaan lingkungan yang sehat di dalam permukiman merupakan salah satu aspek dalam pembangunan nasional (Djadjuli, 2014; Suprijanto, 2004). Berbagai upaya dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk dapat memenuhi penyediaan lingkungan yang sehat di permukiman (Eni, 2015). Banyak upaya penyediaan lingkungan permukiman yang sehat yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta serta peraturan tentang pembangunan perumahan merupakan contoh betapa pentingnya aspek lingkungan di kawasan permukiman (Hariyanto, 2010; Tisya & Masnun, 2022). Upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta tidak terlepas dari berbagai

kekurangan dan kelemahan, sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan permukiman. Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pembuangan limbah domestik terutama limbah rumah tangga pada saluran drainase serta prasarana dan sarana dasar kawasan permukiman masih sangat minim, seperti air bersih/minum, sanitasi, drainase, dan sistem persampahan (Putri, 2018).

Pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur secara umum diidentifikasi memiliki keterbatasan jika ditinjau dari segi aspek fisik, terutama penyiapan lahan untuk berbagai kegiatan aktivitas sosial ekonomi kawasan. Pengembangan potensi fisik kawasan permukiman perlu untuk dioptimalkan dengan merangsang pertumbuhan kawasan khususnya yang bersentuhan langsung dengan kawasan ekonomi strategis yang memiliki potensi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan perkembangan kawasan lainnya, sehingga program pembangunan dapat dimaksimalkan sesuai karakteristik dan dinamika perkembangan Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang sedang berlangsung.

Selain permasalahan yang disebutkan di atas, mengindikasikan bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan prasarana dasar kawasan permukiman Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur saat ini diidentifikasi belum terintegrasi dengan perangkat kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan normatif. Dengan demikian melalui upaya sinergitas dan sinkronisasi berbagai perangkat kebijakan pembangunan, khususnya dalam konteks implementasi program-program pembangunan, diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan kebutuhan prasarana dasar yang layak, sehat dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Secara administrasi wilayah Desa Pongkeru memiliki luas wilayah 30,52 km<sup>2</sup>, terdapat 3 dusun yaitu Dusun Hulu Padang, Dusun Kawasule, dan Dusun Salosikambar. Untuk Dusun Hulu Padang dan Dusun Kawasule kondisi prasarana jalannya adalah beton, sedangkan untuk Dusun Salosikambar jalannya dalam kondisi aspal karena merupakan jalan poros Malili - Kolaka Utara. Namun demikian untuk kondisi jalan setapak yang ada dalam kawasan permukiman masih memerlukan peningkatan. Pemanfaatan air bersih masyarakat Desa

Pongkeru bersumber dari PDAM, air tanah dangkal, air tanah dalam dan sebahagian masyarakat masih ada yang menggunakan air permukaan/sungai, utamanya masyarakat berada di daerah bantaran sungai.

Untuk pengelolaan persampahan, umumnya masyarakat mengolah sampahnya dengan sistem konvensional yakni, dibakar, ditanam dan dibuang secara langsung ke sungai. Sedangkan untuk pengelolaan limbah hasil buangan rumah tangga memerlukan penanganan, sebab sebagian limbah yang dihasilkan dialirkan melalui drainase atau langsung mengalir ke sungai. Kondisi prasarana drainase yang ada saat ini untuk semua dusun sudah terpenuhi, namun demikian masih memerlukan peningkatan dalam hal pengelolaan sebab hampir semua drainase yang ada mengalami sedimentasi. Prasarana listrik dan telepon sampai saat ini sudah terpenuhi, ditandai dengan jumlah unit rumah semuanya sudah menggunakan listrik sebagai alat penerangan dan jaringan telepon menggunakan telepon seluler. Namun, tentu saja masih perlu dilakukan kajian secara mendalam untuk menganalisis kebutuhan prasarana dasar pada kawasan permukiman Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sehingga

dapat membantu pemerintah setempat untuk menyusun rencana dan kebijakan agar kebutuhan prasarana dasar dapat terpenuhi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebutuhan prasarana dasar kawasan permukiman Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

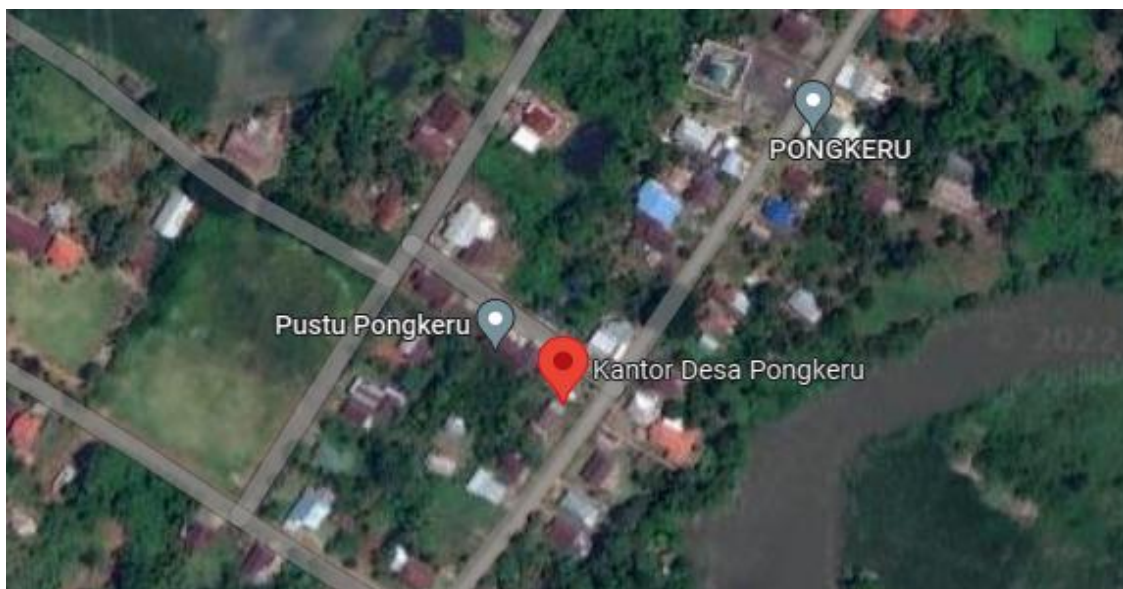
## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan teknik observasi lapangan, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu tidak dimulai dari deduksi teori tetapi objektif melalui perhitungan ilmiah dimana peneliti terjun ke lapangan mempelajari, menganalisis,

menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan sehingga menemukan makna yang akan menjadi hasil dari penelitian.

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pongkeru Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Waktu Penelitian direncanakan berlangsung pada bulan Juli 2023 hingga Agustus 2023. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Pongkeru memerlukan penanganan dan pembangunan prasarana dasar yang berkelanjutan.



**Gambar 1.** Peta Lokasi Penelitian

### 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer

diperoleh langsung dari lapangan, seperti data ketersediaan serta kondisi prasarana dasar Desa Pongkeru, kondisi sosial-

ekonomi, peta eksisting kawasan dan data proyeksi jumlah penduduk sedangkan data sekunder berupa data-data pendukung yang di peroleh dari instansi teknis terkait. Data sekunder yang dimaksud adalah letak geografis wilayah, demografi dan kependudukan, tata guna lahan dan data prasarana dasar, meliputi : prasarana jalan, drainase, persampahan, dan air bersih.

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, adalah analisis kuantitatif dalam hal ini adalah analisis pembobotan, metode ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan prasarana dasar dilokasi penelitian. Indikator penilaian dengan standar dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Kondisi Prasarana Jalan

##### 1) Cakupan Layanan

- a) Cakupan Layanan Jalan Tidak Memadai di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- b) Cakupan Layanan Jalan Tidak Memadai di 51% -75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- c) Cakupan Layanan Jalan Tidak Memadai di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot 1)

##### 2) Lapisan Permukaan Jalan

- a) Permukaan jalan diperkeras dengan aspal/paving blok mencapai >70% (Nilai Bobot 5)
- b) Permukaan jalan diperkeras dengan aspal/paving blok dikisaran 40 – 70% (Nilai Bobot 3)
- c) Permukaan jalan diperkeras dengan aspal/paving blok < 40% (Nilai Bobot 1)

#### 3) Tingkat Kerusakan Jalan (berdasarkan SK Menteri PU No. 77/KPT/Db/1990 Tentang Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan)

- a) Tingkat kerusakan jalan berlubang hanya < 3% (Nilai Bobot 5)
- b) Tingkat kerusakan jalan berlubang kisaran antara 3%-10% (Nilai Bobot 3)
- c) Tingkat kerusakan jalan berlubang>10% (Nilai Bobot 1)

#### b. Kondisi Prasarana Drainase

##### 1) Cakupan Pelayanan Drainase

- a) Drainase Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal di 76% - 100% Luas Area (Nilai Bobot 5)
- b) Drainase Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal

- di 51% - 75% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- c) Drainase Tidak Mampu Mengatasi Genangan Minimal di 25% - 50% Luas Area (Nilai Bobot 1)
- 2) Panjang Drainase, sasaran pembobotan kondisi drainase adalah drainase di kawasan permukiman berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual tentang Drainase
- a) 76%-100% Tingkat kesesuaian dengan standar (Nilai Bobot 5)
- b) 51% - 75% Tingkat kesesuaian dengan standar (Nilai Bobot 3)
- c) 25% - 50% Tingkat kesesuaian dengan standar (Nilai Bobot 1)
- c. Kondisi Penyediaan Air Bersih
- 1) Layanan Pipa PDAM Peruma
- a) Jika > 70% KK terlayani pipa PDAM dari total KK dalam kawasan (Nilai Bobot 5)
- b) Jika 40% - 70% KK terlayani pipa PDAM dari total KK dalam kawasan (Nilai Bobot 3)
- c) Jika < 40% terlayani pipa PDAM dari total KK dalam kawasan (Nilai Bobot 1)
- 2) Pelayanan Air Minum Oleh PDAM
- a) Jika lama air mengalir >70% dari 24 jam atau diatas 16.8 jam per hari (Nilai Bobot 5)
- b) Jika lama air mengalir 40% - 70% dari 24 jam atau antara 9.6 – 16.8 jam per hari (Nilai Bobot 3)
- c) Jika lama air mengalir < 40% dari 24 jam atau dibawah 9.6 jam per hari (Nilai Bobot 1)
- c. Kondisi Persampahan
- Metode pembobotan berdasarkan Norma Standar Prosedur Manual tentang persampahan adalah sebagai berikut
- 1) Gerobak Sampah
- a) Jumlah KK yang terlayani di > 70% (Nilai Bobot 5)
- b) Jumlah KK yang terlayani di 40% - 70% Luas Area (Nilai Bobot 3)
- c) Jumlah KK yang terlayani di < 40 % Luas Area (Nilai Bobot 1)
- 2) Kontainer
- a) Jumlah KK yang terlayani di > 70% (Nilai Bobot 5)
- b) Jumlah KK yang terlayani di 40% - 70% Luas Area (Nilai Bobot 3)

- c) Jumlah KK yang terlayani di < 40 % Luas Area (Nilai Bobot 1)

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Prasarana Jalan Lingkungan

Berdasarkan hasil survey lapangan dan perhitungan analisis GIS dari interpretasi peta tahun 2021 diketahui 6.722 meter jalan didalam kawasan pemukiman ini merupakan paving blok. Dimana persentase panjang jalan paving blok/aspal adalah persentase perbandingan panjang jalan beraspal dengan total panjang jalan yaitu 50,35% (nilai 3).

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa panjang jalan yang berada di wilayah studi 13.350 meter dengan panjang jalan kondisi baik 12.833 sedangkan panjang jalan kondisi rusak 517 meter. Maka persentase tingkat jalan rusak adalah persentase perbandingan total panjang jalan rusak dengan total panjang jalan yaitu 3,87% (nilai 3).

Adapun pembobotan tingkat ketersediaan dari prasarana jalan di lokasi penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.** Parameter Tingkat Ketersediaan Prasarana Jalan

No	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Panjang jalan	Baik	5
2	Lapisan permukaan jalan	Sedang	3
3	Tingkat kerusakan jalan	Sedang	3
Jumlah			11
Rata – rata			3,7

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

Hasil perhitungan tabel 1 dapat diketahui rata-rata kualitas prasarana jalan adalah 3 sehingga mengacu pada metode pembobotan yang ada, kriteria kondisi prasarana jalan dikategorikan sedang. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan jalan. sehingga apabila kerusakan jalan diperbaiki maka akan mendapat nilai 5 dengan kategori baik.

### 2. Kondisi Prasarana Drainase

Meskipun di wilayah penelitian memiliki topografi beragam yang

memungkinkan terjadinya aliran air secara gravitasi, tetapi kenyataan sering terjadi permasalahan dengan jaringan drainase. Adanya banjir di beberapa bagian dan luapan air merupakan akibat yang ditimbulkan dari kondisi jaringan drainase. Kondisi ini sangat beragam, disebabkan adanya penyempitan saluran, penumpukan sampah, aliran air di drainase tidak mengalir dan sedimentasi saluran. Dengan total panjang jalan 13.350 m, sedangkan total panjang

drainase 7.000 m, maka cakupan drainase adalah persentase perbandingan total panjang drainase dengan total panjang jalan yaitu 53,4% (nilai 3).

**Tabel 2.** Kondisi dan Panjang Drainase

No	Nama jalan	Baik (M)	Rusak Ringan(M)	Rusak Sedang (M)	Rusak Berat (M)
1	Jln.pertambangan	-	-	3.047	-
2	Jln.pertanian	-	-	-	543
3	Jln.pendidikan	-	-	102	-
4	Jln.gaharu	-	-	-	125
5	Jln.hasanuddin	-	-	-	483
6	Jln.beton	-	-	-	-
7	Dsn.kawasule	-	1.200	-	-
8	Jln.poros tenggara	1.420	-	-	-
9	Lorong I	-	80	-	-
Jumlah		1.420	-	5.580	-
Total panjang drainase		-	-	7.000	-

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Drainase yang berada di Desa Pongkeru memiliki lebar 70-90 cm, kita dapat melihat drainase yang rusak di daerah tersebut pada tabel di atas, untuk mengetahui skala pelayanan terhadap luas area maka digunakan penilaian yaitu persentase perbandingan totalo panjang drainase yang rusak dengan total panjang drainase. Sehingga diperoleh nilai 79,7% (nilai 5

**Tabel 3.** Kondisi Drainase

No	Parameter	Kondisi	Nilai
1	Cakupan Drainase	Sedang	3
2	Panjang Drainase	Baik	5
Jumlah			8
Rata – rata		Sedang	4

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2023

Hasil perhitungan tabel 3 dapat diketahui rata-rata adalah 4 sehingga dapat dialirkan secara langsung menuju pembuangan mengacu pada metode pembobotan yang ada, kondisi drainase dikategorikan sedang. Meskipun panjang drainase sudah berada pada kategori baik, cakupan wilayah yang dijangkau masih berada pada kategori sedang, oleh karena itu diperlukan penambahan drainase khususnya wilayah-wilayah yang padat dan rawan genangan air agar air limbah dapat dialirkan secara langsung menuju pembuangan

### 3. Kondisi Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang digunakan dalam sehari-hari. Menurut departemen kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat (Sisca, 2016; Pranoto, 2014). Dari



data pengguna air bersih di Desa Pongkeru terlihat sebagian warga menggunakan air dari PDAM dan sumur gali.

Lanjut data yang diperoleh di lapangan sebanyak 96 KK menggunakan air bersih melalui PDAM, maka layanan air bersih PDAM adalah persentase perbandingan jumlah KK terlayani dengan jumlah KK keseluruhan. Sehingga diperoleh nilai 17,78%. Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa hanya terdapat 17,78% KK yang terlayani jaringan air bersih pipa PDAM, sehingga berdasarkan pedoman dimana jika < 40% terlayani pipa PDAM dari total KK dalam kawasan (Nilai Bobot 1).

Dari segi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi penduduk permukiman yang telah dilayani oleh PDAM, penyaluran air ini mengalir setiap hari selama 24 jam. Untuk mengetahui tingkat pelayanan air minum oleh PDAM di kawasan penelitian maka kontinuitas air minum adalah persentase perbandingan tingkat kelancaran yang terjadi dengan tingkat kelancaran ideal, sehingga diperoleh nilai 100%. Mengacu pada SPM Kebutuhan air minum untuk permukiman digolongkan untuk kebutuhan perjiwa penghuni (jumlah penduduk) membutuhkan 60 liter/hari

**Tabel 4.** Analisis Prasarana Air Minum Permukiman Desa Pongkeru

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan air Minum (liter/hari)	Kebutuhan air minum Tiap penduduk (liter/detik)
1	2020	2.032	121.920	1,41
2	2025	2.427	145.620	1,69
3	2030	2.822	169.320	1,96

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2023

#### 4. Kondisi Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterakaiannya, dalam proses – proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk – produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut akan tetapi karena dalam kehidupan manusia

didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya. Masyarakat Desa Pongkeru membuang sampah disembarang tempat seperti di lahan kosong dan drainase dengan cara dikumpulkan kemudian dibakar.kebiasan masyarakat membuang sampah disembarang tempat ini diakibatkan karena tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

SPM untuk prasarana persampahan adalah 1 gerobak sampah = 200 KK. Hasil survey lapangan tidak terdapat satupun gerobak sampah, mengacu pada SPM yang berlaku, jumlah gerobak sampah yang harus tersedia adalah 6 unit, berdasarkan Jumlah KK yang terlayani jika < 40 % Luas Area (Nilai Bobot 1).

SPM untuk kontainer sampah adalah 1 kontainer melayani 2.000 KK.

Sementara hasil survey lapangan, diperoleh data bahwa dikawasan pemukiman belum terdapat kontainer sampah. Karena jumlah KK di lokasi penelitian 540 KK. Mengacu pada SPM maka, dilokasi penelitian belum layak terdapat kontainer sampah. Jika jumlah KK yang terlayani < 40 % Luas Area (Nilai Bobot 1).

**Tabel 5.** Kondisi Persampahan

No.	Parameter	Kriteria	Nilai
1	Gerobak sampah	1	Buruk
2	Kontainer sampah	1	Buruk
Jumlah			2
Rata – rata			1
			Buruk

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2023

Jumlah timbunan sampah setiap hari untuk tiap jiwa, yaitu 2,9 liter/hari. Diasumsikan bahwa tiap satu rumah akan

dialami oleh 1 KK dengan 5 jiwa. Tiap 1 KK menghasilkan timbunan sampah 14,5 liter/hari.

**Tabel 6.** Jumlah Timbunan Sampah Tiap KK

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Jumlah timbunan Sampah Tiap KK (Liter/Hari)	Kebutuhan prasarana Persampahan	
					Gerobak (Unit)	Container (Unit)
1	2020	2.032	540	7.830	3	0
2	2025	2.427	635	9.207,5	3	0
3	2030	2.822	730	10.585	4	0

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun 2020 timbunan sampah dari 540 KK adalah 7.830 liter/hari dan pada tahun 2030 sebanyak 10.585 liter/hari. Adapun untuk kebutuhan prasarana persampahan di tahun 2023

adalah 4 unit gerobak dan 0 unit Kontainer.

## 5. Rekapitulasi Kondisi Prasarana Dasar

Berikut adalah tabel ketersediaan prasarana dasar kawasan permukiman Desa Pongkeru:

**Tabel 7.** Rekapitulasi Kondisi Prasarana Dasar

No	Prasarana	Keterangan	Nilai
1	Jalan	Sedang	3,7

No	Prasarana	Keterangan	Nilai
2	Drainase	Sedang	4
3	Air bersih	Sedang	3
4	Persampahan	Buruk	1
Jumlah			11,7
Rata – rata			3

Sumber : Hasil Analisis, Tahun 2023

Dari hasil rekapitulasi ditabel di atas tersebut, dapat ditetapkan bahwa kondisi prasarana Permukiman Desa Pongkeru, Adapun jenis prasarana yang sangat memerlukan penanganan adalah prasarana persampahan, dimana kondisi prasarana persampahan di permukiman Desa Pongkeru belum dikelola secara optimal. Untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup, diperlukan kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah, khususnya limbah atau sampah rumah tangga. Hambatan yang paling signifikan adalah tidak adanya partisipasi lingkungan dari rumah tangga dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Dampak negatif pembuangan sampah atau limbah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan berbagai masalah, penvebaran air adalah salah satunya contohnya.

Apalagi ketika sampah atau limbah dibuang ke sungai bukan ke tempat sampah, selain bisa menyebabkan banjir hal tersebut juga bisa menyebabkan pencemaran air. Selain dapat mencemari sumber air, pembuangan limbah atau sampah di sungai juga dapat berdampak

pada terhambatnya proses pembentukan air tanah, yang jelas hal tersebut merupakan semua dampak negatif dari aktivitas manusia dalam membuang sampah secara sembarangan mengingat pentingnya air tanah bagi kehidupan manusia.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa kondisi prasarana dasar permukiman di Desa Pongkeru yakni:

1. Jalan di Desa Pongkeru adalah aspal dengan panjang 6.722 meter dan beton dengan panjang 6.628 meter kondisi baik.
2. Drainase di Desa Pongkeru adalah drainase sekunder kondisi permanen dengan lebar 70-90 cm.
3. Untuk air bersih di Desa Pongkeru terdapat 96 KK yang sudah terjangkau air PDAM dan sisanya memakai air tanah dangkal dan dalam.
4. Untuk persampahan di Desa Pongkeru masih di kelola secara konvensional setiap rumah tangga dengan cara dibakar dan ditanam

## DAFTAR PUSTAKA

- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8-21.
- Eni, S. P. (2015). Upaya-upaya pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi masalah permukiman kumuh di perkotaan. *Scale*, 2(2), 243-252.
- Hariyanto, A. (2010). Strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat (contoh kasus: kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA*, 7(2), pp-11.
- Hidayati, N., Putra, A., Dewita, M., & Framujiastri, N. E. (2020). Dampak dinamika kependudukan terhadap lingkungan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 80-89.
- Indrajaya, I., Rusida, R., & Baharuddin, A. F. (2022). Strategi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Kota Belopa Kabupaten Luwu. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 136-146.
- Mari, N. A. H. (2022). Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Ende Sebagai Upaya Pencegahan Urbanisasi. *Jurnal Geografi*, 18(1), 52-63.
- Putri, L. D. (2018). Potensi Pengembangan Utilitas Wilayah Kumuh Di Kelurahan Muara Fajar Kota Pekanbaru. *Jurnal Teknik Sipil Unaya*, 4(1), 11-20.
- Pranoto, E., Jasman, J., & Mokoginta, J. (2014). Kandungan Bakteri Escherichia Coli Dan Coliform Pada Air Minum Dalam Kemasan Merk Lokon Di Desa Warembungan. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(1), 1-6.
- Sisca, V. (2016). Penentuan Kualitas Air Minum Isi Ulang Terhadap Kandungan Nitrat, Besi, Mangan, Kekeruhan, pH, Bakteri E. Coli dan Coliform. *Chempublish journal*, 1(2), 21-31.
- Syaban, A. S., Tilaar, S., & Sembel, A. (2014). Analisis Kebutuhan Prasarana Dasar Permukiman Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 6(1), 199-206.
- Sudibia, I. K., Dayuh Rimbawan, I. N., & Adnyana, I. B. (2012). Pola migrasi dan karakteristik migran berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 di Provinsi Bali. *Piramida*, 8(2), 59-75.
- Suprijanto, I. (2004). Reformasi Kebijakan & Strategi Penyelenggaraan Perumahan & Permukiman. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 32(2).
- Tisya, N. A. D., & Masnun, M. A. (2022). Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapannya pada Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sidoarjo. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 76-91.